

PERAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI (POKTAN) DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN LOKAL PERKOTAAN MELALUI URBAN FARMING DI KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

Median Fratama^{1*}, Nurul Khotimah¹

Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi : medianfratama.ptk@gmail.com

ABSTRAK

Ketahanan pangan di wilayah perkotaan seperti Kota Pontianak semakin tertekan oleh berkurangnya lahan produktif akibat alih fungsi serta meningkatnya ketergantungan masyarakat pada suplai pangan dari luar daerah. Kondisi ini menimbulkan kerentanan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah, dan memperkuat urgensi penerapan *urban farming* serta penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai strategi kemandirian pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ketahanan pangan Pontianak, peran *urban farming* dalam memperkuat sistem pangan lokal, dinamika pembentukan kelompok tani, serta arahan kebijakan yang relevan. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka berbasis sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, regulasi nasional, data lokal terkait praktik *urban farming*, serta informasi hasil wawancara pendukung. Analisis data dilakukan melalui teknik *content mapping* untuk mengelompokkan temuan berdasarkan empat rumusan masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa *urban farming* berkontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan rumah tangga, efisiensi biaya konsumsi, dan peluang usaha skala kecil. Pembentukan kelompok tani terbukti meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat, namun masih terkendala keterbatasan lahan, permodalan, dan pendampingan teknis. Dukungan pemerintah dan kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program. Kesimpulannya, *urban farming* berpotensi besar mendukung ketahanan pangan Kota Pontianak, tetapi membutuhkan penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan literasi teknis masyarakat, serta kebijakan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan pelaku di lapangan.

Kata kunci : kebijakan publik, kelompok tani, ketahanan pangan, Pontianak, *urban farming*,

1 PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan ketahanan pangan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, dan tingginya tekanan urbanisasi. Kondisi tersebut juga dialami oleh Kota Pontianak, di mana perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke permukiman dan infrastruktur telah mengancam keberlanjutan sistem pangan lokal.

Pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rentannya sistem pangan nasional terhadap krisis global. Rozaki (2021) menyoroti bahwa pandemi mengakibatkan gangguan distribusi, kenaikan harga input pertanian, serta penurunan daya beli masyarakat. Hal ini mendorong perlunya strategi ketahanan pangan yang lebih berbasis lokal dan partisipatif. Dalam hal ini, *urban farming* atau pertanian perkotaan menjadi salah satu alternatif yang dapat menjawab tantangan tersebut.

Gunapala et al. (2025) menjelaskan bahwa *urban agriculture (UA)* berperan sebagai jalur strategis dalam membangun ketahanan dan memastikan keamanan pangan yang berkelanjutan di kota-kota besar. Croce dan Vettorato (2021) menambahkan bahwa praktik pertanian perkotaan baik berbasis lahan, atap bangunan, maupun vertikultur dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan iklim dan efisiensi ekologi kota. Steviano dan Kustanti (2021) juga menegaskan bahwa *urban farming* di Indonesia telah berkembang menjadi gerakan sosial-ekologis yang mendukung ekonomi keluarga sekaligus mengurangi limbah perkotaan.

Namun, keberhasilan *urban farming* sangat bergantung pada aspek kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, Kelompok Tani (Poktan) memiliki fungsi utama sebagai wadah belajar, kerja sama, dan unit produksi yang membantu petani dalam mengakses teknologi dan sumber daya. Sumaryanto dan Rustandi (2017) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani merupakan langkah fundamental dalam membangun sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Akbar et al. (2025) melalui kajiannya tentang tata kelola kelembagaan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antar-lembaga dan dukungan kebijakan publik merupakan kunci keberhasilan penguatan ketahanan pangan. Dalam konteks *urban farming*, Poktan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya pertanian perkotaan.

Selain itu, inisiatif seperti budidaya ayam petelur berbasis ekonomi kreatif (Gosestjahjanti et al., 2024) menunjukkan bahwa kegiatan pertanian dan peternakan dapat diintegrasikan secara produktif dalam ruang kota. Kegiatan ini tidak hanya menyediakan sumber protein bagi rumah tangga, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang ramah lingkungan.

Raja et al. (2024) menegaskan bahwa perencanaan pertanian perkotaan harus dilakukan secara adil dan partisipatif (*equitable urban agriculture*), agar semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat. Hal ini sejalan dengan temuan Mulya, Hudalah, dan Prilandita (2024) bahwa wilayah peri-urban berperan penting sebagai zona penyangga pangan yang dapat menopang ketersediaan pangan kota.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan *urban farming*, pembentukan Kelompok Tani (Poktan), serta dukungan pemerintah dapat saling bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan di Kota Pontianak. Kajian ini berfokus pada gambaran kondisi ketahanan pangan Kota Pontianak saat ini, peran *urban farming* dalam mendukung sistem pangan perkotaan, proses pembentukan Poktan beserta dukungan pemerintah dalam memperkuat sistem pangan lokal, serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan Poktan di Kota Pontianak.

2 METODE PENELITIAN DAN TAHAPAN KAJIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (*literature review*). Kajian pustaka dilakukan untuk menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *urban farming*, kelembagaan Kelompok Tani (Poktan), dan ketahanan pangan perkotaan di Kota Pontianak.

Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara konseptual hubungan antara kebijakan, kelembagaan, dan praktik masyarakat dalam memperkuat sistem pangan lokal. Menurut Akbar et al. (2025), analisis kelembagaan dan kebijakan dapat menjelaskan keterkaitan antara dukungan pemerintah dan efektivitas pelaksanaan program pangan di tingkat lokal. Dengan demikian, metode ini relevan untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat analitis dan konseptual.

2.2 Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap referensi ilmiah dan regulasi yang relevan. Sumber utama penelitian meliputi lima jurnal ilmiah internasional yang membahas ketahanan pangan, pertanian perkotaan (*urban farming*), kelembagaan pangan, serta dinamika wilayah peri-urban. Jurnal-jurnal tersebut digunakan untuk memperoleh kerangka konseptual dan temuan empiris terkini mengenai peran *urban farming* dan kelembagaan dalam memperkuat sistem pangan.

Penelitian ini juga menggunakan lima buku dan volume akademis sebagai landasan teoritis dan kerangka analisis terkait pengembangan *urban farming* dan kelembagaan petani. Sebagai dasar hukum, digunakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani yang menjadi acuan dalam memahami fungsi dan mekanisme pembentukan Kelompok Tani (Poktan).

Untuk memperkuat konteks lokal, penelitian ini memanfaatkan satu jurnal nasional terindeks, yaitu Fatahillah (2022), yang menyajikan data perubahan tutupan lahan dan konversi lahan produktif di Kota Pontianak. Selain itu, satu sumber digital berbasis komunitas dari akun resmi @marianaptk.kota (2025) digunakan untuk memberikan gambaran aktual praktik *urban farming* terpadu berbasis masyarakat di Kota Pontianak.

Pemilihan sumber pustaka dalam penelitian ini dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama. Pertama, sumber harus memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, *urban farming*, dan kelembagaan Kelompok Tani di wilayah perkotaan. Kedua, sumber yang digunakan harus memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, yang ditunjukkan melalui publikasi pada jurnal bereputasi, buku akademik, serta regulasi resmi pemerintah. Ketiga, aspek keterkinian juga menjadi pertimbangan penting, di mana sumber pustaka diutamakan berasal dari publikasi dalam sepuluh tahun terakhir agar analisis yang dihasilkan mencerminkan perkembangan konsep, kebijakan, dan praktik terbaru di bidang ketahanan pangan dan pertanian perkotaan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka elektronik menggunakan platform akademik seperti ScienceDirect, SpringerLink, serta portal resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penelusuran ini bertujuan memperoleh sumber ilmiah dan regulasi yang relevan serta kredibel untuk mendukung analisis ketahanan pangan perkotaan dan *urban farming* di Kota Pontianak. Setiap sumber dianalisis secara sistematis dengan memperhatikan tema utama, konsep kunci, dan temuan empiris yang berkaitan dengan ketahanan pangan lokal, sistem pangan perkotaan, praktik *urban farming*, pembentukan dan

fungsi kelembagaan Kelompok Tani (Poktan), serta dukungan kebijakan dan faktor sosial kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan program.

Selanjutnya, referensi yang terpilih diseleksi menggunakan pendekatan content mapping, yaitu pengelompokan literatur berdasarkan kesamaan ide dan relevansinya terhadap empat rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan analisis yang lebih terstruktur dan komprehensif, sekaligus mengaitkan temuan teoritis dengan konteks empiris ketahanan pangan dan pengembangan *urban farming* di Kota Pontianak.

2.4 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar-konsep dari berbagai sumber pustaka. Metode ini dipilih karena mampu menyusun tema-tema utama secara sistematis dari data kualitatif serta mensintesis temuan lintas literatur. Proses analisis diawali dengan kategorisasi, yaitu pengelompokan bagian literatur yang membahas isu serupa, seperti praktik *urban farming*, peran kelembagaan Kelompok Tani (Poktan), dan kebijakan ketahanan pangan.

Tahap selanjutnya adalah sintesis konseptual untuk membangun pemahaman mengenai hubungan antara *urban farming*, kelembagaan Poktan, dan ketahanan pangan perkotaan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan interpretasi kontekstual, yaitu mengaitkan temuan literatur dengan kondisi nyata ketahanan pangan di Kota Pontianak. Melalui pendekatan ini, *urban farming* dipahami tidak hanya sebagai praktik pertanian, tetapi sebagai strategi sosial-ekologis yang diperkuat oleh kelembagaan masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah.

2.5 Tahapan Kajian

Tahapan pelaksanaan kajian pustaka dilakukan melalui lima langkah sistematis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Kajian

Tahap	Kegiatan Utama	Hasil yang Diharapkan
1	Identifikasi masalah ketahanan pangan di Kota Pontianak	Rumusan masalah dan fokus kajian yang jelas
2	Penelusuran literatur ilmiah dan regulasi terkait <i>urban farming</i> dan Poktan	Kumpulan sumber pustaka kredibel dan relevan
3	Analisis isi dan tematik terhadap sumber pustaka terpilih	Temuan konseptual dan empiris dari berbagai studi
4	Sintesis teori dan konteks lokal Kota Pontianak	Model konseptual hubungan antara <i>urban farming</i> , Poktan, dan ketahanan pangan
5	Penyusunan artikel ilmiah berbasis hasil analisis pustaka	Dokumen akademik yang menjawab empat rumusan masalah

Sumber: Diadaptasi dari kajian pustaka (Sumaryanto & Rustandi, 2017; Akbar et al., 2025; Gunapala et al., 2025)

Metode dan tahapan kajian ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, berbasis bukti ilmiah, dan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan perkotaan yang berkelanjutan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Ringkasan Sumber Data Penelitian

No.	Nama Penulis	Tahun Terbit	Judul Jurnal/Buku	Intisari
1	Campbell, C. G., DeLong, A., & Campbell, D. N	2025	Who are urban farmers? A typology of goals, motivations, and reasons for urban farming	Mengidentifikasi tipologi petani kota, motivasi, orientasi usaha, dan tujuan <i>urban farming</i> secara komprehensif.
2	Gunapala, R., Gangahagedara, R., Wanasinghe, W. C. S., dkk.	2025	Urban agriculture: A strategic pathway to building resilience and ensuring sustainable food security in cities	Menjelaskan urban agriculture sebagai strategi ketahanan pangan dan resiliensi iklim.
3	Akbar, A., Darma, R., Irawan, A., dkk.	2025	An institutional framework for enhanced food security amidst the COVID-19 pandemic	Menggambarkan peran koordinasi kelembagaan dan kebijakan publik dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
4	Mulya, S. P., Hudalah, D., & Prilandita, N.	2024	Developing a new methodology for determining typologies of peri-urban agriculture	Menyusun metodologi statistik baru untuk menentukan tipologi PUA dalam kawasan mega-urban.
5	Gosestjahjanti, F. S., Winanti, W., Basuki, S., dkk.	2024	Sosialisasi Program Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ayam Petelur Berbasis Ekonomi Kreatif	Menjelaskan model budidaya ayam petelur rumah tangga untuk ketahanan pangan dan UMKM lokal.
6	Rozaki, Z.	2021	Food security challenges and opportunities in Indonesia post COVID-19	Menguraikan tantangan ketahanan pangan Indonesia dan peluang penguatan sistem pangan pasca COVID-19.
7	Croce, S., & Vettorato, D.	2021	Urban surface uses for climate-resilient and sustainable cities	Menjelaskan ragam UA seperti BIA, hidroponik, dan akuakultur dalam membangun kota berkelanjutan.

8	Raja, S., Campbell, M. C., Judelsohn, A., dkk.	2024	Planning for equitable urban agriculture	Menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan dalam urban agriculture yang inklusif.
9	Steviano, O., & Kustanti, E.	2021	<i>Urban Farming: Solusi Bertani di Perkotaan</i>	Menyajikan panduan teknis dan metode bertani di perkotaan menggunakan lahan terbatas.
10	Sumaryanto & Rustandi, Y.	2017	Buku Ajar Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	Membahas konsep dasar, fungsi, dan proses pengembangan kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan).
11	Kementerian Pertanian RI	2016	Permentan 67/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	Regulasi resmi tentang definisi, struktur, fungsi, dan tahapan pembentukan Poktan.
12	Fatahillah, A.	2022	Analisis perubahan tutupan lahan di Kota Pontianak: Kajian tutupan sawah dan lahan terbuka	Mengidentifikasi perubahan tutupan lahan Pontianak (2009–2021) dan peningkatan signifikan konversi lahan pertanian menjadi permukiman.
13	Aldo (Penyuluh Pertanian, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak)	2025	<i>Wawancara tentang proses pendampingan urban farming, mekanisme program pemerintah, dan tantangan penyuluh</i> (Transkrip audio wawancara, 2025)	Wawancara menjelaskan bahwa program <i>urban farming</i> dan bantuan pemerintah sangat bergantung pada mekanisme Musrenbang serta kemampuan masyarakat mengusulkan program secara formal. Penyuluh dapat memfasilitasi pelatihan dasar bagi Poktan pemula, namun bantuan fisik bergantung pada anggaran tahunan dan prioritas pemerintah.
14	marianaptk.kota [@marianaptk.kota]	2025	<i>PAKAR TUE MARIANA ...</i> [Reel, Instagram]	Menjelaskan model <i>urban farming</i> terpadu (sayuran–ikan–ayam–kompos) sebagai strategi ketahanan pangan keluarga di Pontianak.

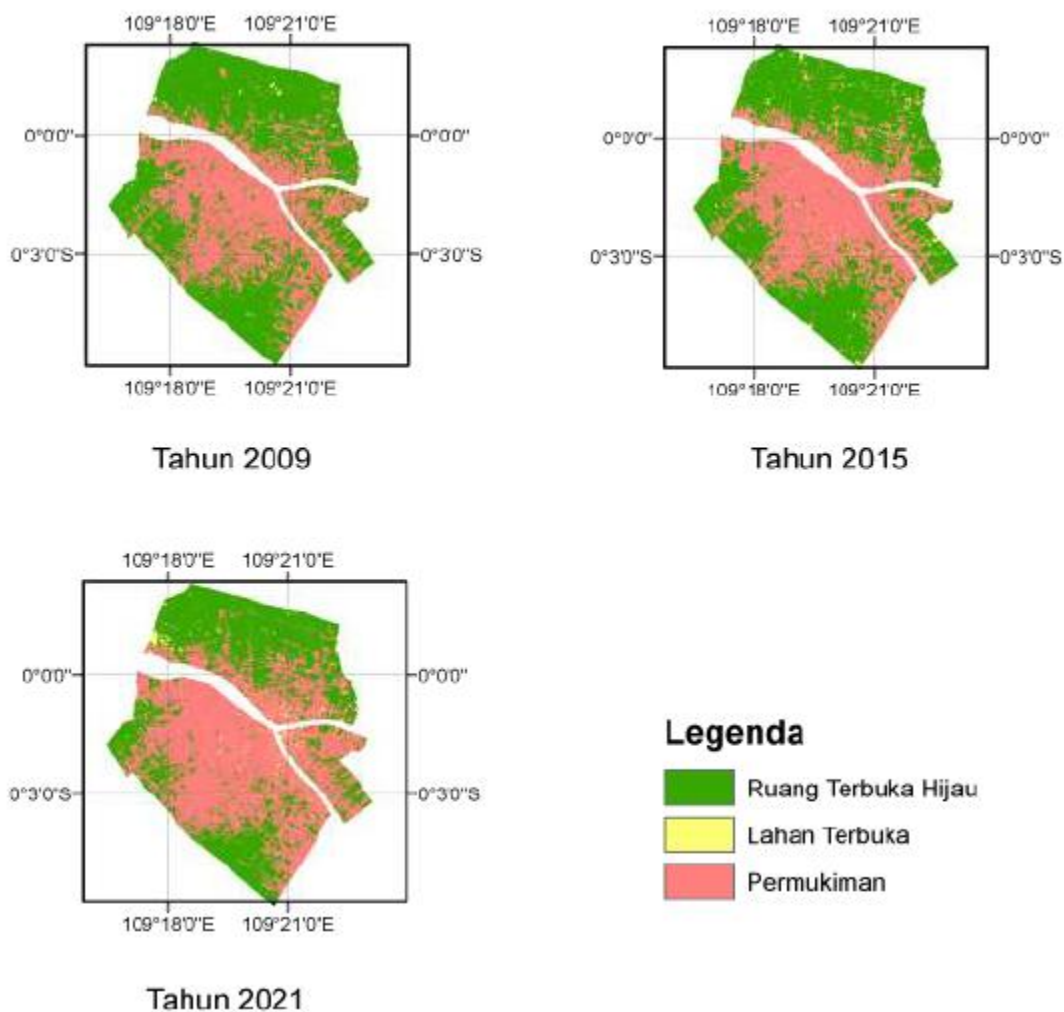
Sumber: Data yang diolah (2025)

3.1 Kondisi Ketahanan Pangan di Wilayah Kota Pontianak

Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki karakteristik wilayah perkotaan yang padat dengan lahan pertanian terbatas. Konversi lahan produktif menjadi area permukiman dan komersial terus meningkat, sehingga kapasitas produksi pangan lokal menurun signifikan. Tantangan ini mencerminkan kondisi yang dikemukakan oleh Rozaki (2021), bahwa sistem pangan di Indonesia masih rentan terhadap krisis global, terutama akibat perubahan struktur ekonomi dan ketergantungan pada distribusi pangan antardaerah.

Keterbatasan lahan membuat Pontianak bergantung pada pasokan pangan dari daerah hinterland seperti Kubu Raya, Mempawah, dan Landak. Dalam situasi demikian, ketahanan pangan kota bergantung pada stabilitas rantai pasok eksternal. Namun, strategi ketahanan pangan modern tidak lagi menitikberatkan pada produksi semata, melainkan pada resiliensi sistem pangan — yakni kemampuan masyarakat untuk menjaga akses dan distribusi pangan dalam situasi darurat (Gunapala et al., 2025).

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan akibat permintaan untuk lahan terbangun sebagai tempat tinggal. Peta hasil klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 1 sesuai dengan penelitian Fatahillah, (2022) didapatkan akurasi peta tutupan lahan tahun 2009, 2015, dan 2021 berturut-turut sebesar 86%, 87% dan 90%.



Gambar 1. Tutupan Lahan Kota Pontianak (Fatahillah *et al.*, 2022)

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kemandirian pangan mulai terlihat di beberapa Kelurahan melalui inisiatif pertanian rumah tangga, hidroponik, dan peternakan skala kecil. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari ketergantungan konsumtif menuju produksi mandiri berbasis komunitas. Dengan demikian, kondisi ketahanan pangan di Pontianak saat ini berada dalam fase transisi menuju sistem pangan lokal yang lebih inklusif, walaupun masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan.

3.2 Peran *Urban Farming* dalam Mendukung Ketahanan Pangan Kota Pontianak

Urban farming berperan strategis dalam mengurangi tekanan pangan di wilayah perkotaan. Gunapala et al. (2025) menyebut pertanian perkotaan sebagai jalur strategis untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan sempit dan integrasi teknologi produksi modern. Croce dan Vettorato (2021) juga menegaskan bahwa *urban farming* memberikan manfaat ekologis penting, seperti reduksi efek pulau panas perkotaan (*urban heat island*), peningkatan kualitas udara, serta pemanfaatan ruang terabaikan menjadi ruang hijau produktif.

Di Kota Pontianak, praktik *urban farming* berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari vertikultur, hidroponik, akuaponik, hingga sistem integrasi tanaman-ternak yang digerakkan oleh kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan. Steviano dan Kustanti (2021) menjelaskan bahwa *urban farming* tidak hanya mendorong kemandirian pangan keluarga, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang meningkatkan literasi pertanian sekaligus memperkuat jejaring sosial antarwarga.

Pada skala rumah tangga, praktik budidaya ayam petelur menjadi salah satu bentuk *urban farming* yang semakin populer. Beberapa komunitas di Pontianak menerapkan model eco-farming, seperti yang dijelaskan oleh Gosestjahjanti et al. (2024), di mana pekarangan rumah dimanfaatkan untuk memproduksi sayuran cepat panen sekaligus memelihara ayam petelur secara terpadu. Tren baru yang muncul di berbagai media sosial—seperti TikTok, Instagram, dan YouTube—ikut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap pemeliharaan ayam petelur skala rumahan menggunakan kandang baterai mini yang ditempatkan di teras atau halaman samping rumah. Konten-konten yang menampilkan produksi telur harian, efisiensi pakan, serta mudahnya perawatan ayam skala kecil membuat model kandang ini semakin dikenal luas.

Fenomena ini juga didukung oleh meningkatnya ketersediaan kandang baterai portabel di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, yang banyak menawarkan paket siap pakai berisi rangka kandang, tempat pakan-minum, serta box penampungan kotoran. Ketersediaan perangkat ini mempermudah masyarakat perkotaan untuk memulai budidaya ayam petelur tanpa perlu keterampilan teknis yang rumit, sehingga memperluas adopsi *urban farming* berbasis peternakan unggas.

Dengan demikian, *urban farming* di Kota Pontianak tidak hanya menjadi aktivitas bercocok tanam di lahan terbatas, melainkan berkembang menjadi sistem produksi pangan terpadu yang mencakup tanaman, ikan, dan unggas skala rumah tangga. Perkembangan ini memperkuat kemandirian pangan keluarga, menciptakan peluang ekonomi mikro, mengurangi pengeluaran rumah tangga, serta memperkuat ketahanan pangan lokal melalui partisipasi langsung masyarakat dalam siklus produksi pangan yang sehat dan berkelanjutan.

3.3 Peran Pembentukan Poktan dan Dukungan Pemerintah dalam Penguatan Ketahanan Pangan

Pembentukan kelompok tani (Poktan) menjadi faktor kelembagaan yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan *urban farming*. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, Poktan berfungsi sebagai wadah belajar, kerja sama, dan unit produksi yang membantu petani mengakses teknologi, permodalan, serta jaringan pemasaran.

Sumaryanto dan Rustandi (2017) menjelaskan bahwa kelembagaan petani yang kuat mampu memperkuat posisi tawar, efisiensi usaha, dan kapasitas adopsi inovasi. Dalam konteks Kota Pontianak, Poktan dapat menjadi wadah kolaboratif yang menghubungkan masyarakat kota, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam program ketahanan pangan lokal.

Akbar et al. (2025) melalui kerangka kelembagaan pangan di masa pandemi COVID-19 menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memastikan efektivitas program ketahanan pangan. Pemerintah daerah berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan sarana pelatihan, bantuan peralatan, dan dukungan kebijakan.

Dukungan kelembagaan juga sejalan dengan konsep *equitable urban agriculture* dari Raja et al. (2024), yang menekankan pentingnya tata kelola pertanian kota yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program *urban farming* dan menjadi anggota Poktan.

Oleh karena itu, pembentukan Poktan di wilayah perkotaan seperti Pontianak bukan sekadar pembentukan formal, tetapi harus menjadi wadah kolaboratif lintas sektor yang mampu memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat.



Gambar 2. Kampung Pakar Tue Mariana (Median, 2025)

Gambar 2 adalah kunjungan ke lokasi percontohan yang informasinya didapati dari akun instagram @marianaptk.kota dan didampingi oleh pihak kelurahan yang menjadi contoh implementasi *urban farming* di Kota Pontianak tercermin dalam inovasi lokal bertajuk PAKAR TUE MARIANA (Pangan Pekarangan Terpadu Kampong TUE Mariana) yang dikembangkan di Kelurahan Mariana. Program ini mengintegrasikan pertanian, perikanan, peternakan ayam petelur, sistem hidropnik, dan pengelolaan sampah organik dalam satu ekosistem pekarangan rumah tangga. Melalui pendekatan terpadu tersebut, warga mampu memproduksi sayuran,

ikan, dan telur sekaligus mengolah limbah organik menjadi pupuk, sehingga tercipta siklus produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menekan ketergantungan terhadap pasar, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan efisiensi belanja pangan. Keberhasilan PAKAR TUE MARIANA ditopang oleh sinergi antara masyarakat, RT/RW, PKK, dan pemerintah kota, menjadikannya model kolaborasi sosial-ekologis yang efektif dan mudah direplikasi di wilayah perkotaan lainnya. (marianaptk.kota, 2025).

3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Poktan di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan konteks lokal, pembentukan Kelompok Tani (Poktan) di wilayah perkotaan seperti Kota Pontianak dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan keberhasilan Poktan dalam menjalankan fungsi kelembagaan serta mendukung keberlanjutan praktik *urban farming* sebagai strategi penguatan ketahanan pangan.

Dari sisi faktor pendukung, dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, pemerintah menyediakan pembinaan kelembagaan petani melalui pendampingan, penyuluhan, serta fasilitasi sarana dan prasarana usaha. Adanya dasar regulasi dan program pendampingan ini memberikan legitimasi formal bagi Poktan, membuka akses terhadap pelatihan dan bantuan sarana produksi, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok sehingga lebih siap mengelola kegiatan *urban farming* secara berkelanjutan.

Faktor pendukung berikutnya adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif seperti *urban farming*. Kecenderungan warga untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan sempit mencerminkan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya kemandirian pangan, sebagaimana dikemukakan oleh Steviano dan Kustanti (2021). Partisipasi aktif tersebut membentuk modal sosial yang kuat, sehingga proses pembentukan Poktan menjadi lebih cepat, stabil, dan mudah berkembang karena didorong oleh kebutuhan nyata serta keterlibatan sukarela masyarakat.

Selain itu, kolaborasi lintas lembaga turut berperan sebagai faktor pendukung pembentukan Poktan. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat berkontribusi dalam memperluas jaringan, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas teknis dan manajerial kelompok melalui pelatihan, riset terapan, dan inovasi teknologi (Akbar et al., 2025). Kolaborasi ini berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga kegiatan *urban farming* dapat dijalankan secara lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi perkotaan.

Peluang ekonomi kreatif juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Integrasi kegiatan pertanian dengan peternakan ayam petelur dan pengelolaan limbah organik, sebagaimana dikemukakan oleh Gosestjahjanti et al. (2024), membuka peluang usaha berbasis rumah tangga yang ramah lingkungan. Ketika *urban farming* memberikan manfaat ekonomi langsung, baik berupa hasil panen maupun produk olahan, masyarakat terdorong untuk bergabung dalam Poktan. Kondisi ini mempercepat proses pembentukan kelompok sekaligus meningkatkan keberlanjutan kegiatan karena adanya insentif ekonomi yang nyata.

Di sisi lain, pembentukan Poktan di Kota Pontianak juga menghadapi sejumlah faktor penghambat. Keterbatasan lahan dan permodalan menjadi tantangan utama dalam pengembangan *urban farming* di wilayah perkotaan. Minimnya ruang terbuka serta keterbatasan akses modal bagi kelompok masyarakat diperkuat oleh temuan Fatahillah (2022) yang menunjukkan tingginya laju alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini menyulitkan kelompok masyarakat untuk memulai atau memperluas kegiatan pertanian, sehingga potensi kontribusi *urban farming* terhadap ketahanan pangan menjadi terbatas.

Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan. Banyak Poktan yang baru terbentuk belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai, terutama dalam hal administrasi, perencanaan kegiatan, dan pengelolaan kelompok (Sumaryanto & Rustandi, 2017). Tanpa pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, Poktan cenderung mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan, kurang inovatif, dan berisiko mengalami stagnasi.

Hambatan lainnya adalah koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Akbar et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pangan sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang terintegrasi. Ketidaksinkronan antara organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan, dan lembaga pendukung menyebabkan program *urban farming* berjalan secara parsial. Akibatnya, bantuan sering kali tidak tepat sasaran, terjadi duplikasi program, dan Poktan kesulitan mengakses dukungan lintas sektor.

Selain itu, keterbatasan data dan dokumentasi program juga menjadi faktor penghambat penting. Evaluasi kegiatan *urban farming* di Kota Pontianak masih bersifat parsial, sehingga dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan kota sulit diukur. Hal ini sejalan dengan temuan Campbell et al. (2025) yang menyatakan bahwa kurangnya data sosial-ekologis yang komprehensif menghambat evaluasi keberlanjutan *urban farming*. Ketiadaan data terstandar menyebabkan perencanaan kebijakan tidak sepenuhnya berbasis bukti, sehingga potensi pengembangan Poktan tidak terpetakan secara optimal dan keberhasilan program sulit direplikasi.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan Poktan di Kota Pontianak sangat ditentukan oleh kemampuan menyinergikan dukungan kebijakan, partisipasi dan kapasitas masyarakat, serta tata kelola kelembagaan yang adaptif dan terkoordinasi.

3.5 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan temuan wawancara dengan penyuluh pertanian Kota Pontianak, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis *urban farming*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan program pangan sangat bergantung pada mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurut Aldo, penyuluh pertanian di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, usulan *urban farming* perlu diprioritaskan oleh pengurus RT/RW dan perwakilan Poktan dalam Musrenbang agar memiliki peluang lebih besar untuk disetujui oleh pemerintah daerah (Aldo, wawancara pribadi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi warga dalam memanfaatkan kanal perencanaan formal. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendampingan Poktan dalam penyusunan usulan program, termasuk penguatan literasi administrasi dan advokasi komunitas, sejalan dengan mandat Permentan No. 67/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani.

Selain jalur Musrenbang, wawancara juga mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk mengakses bantuan dari pihak eksternal seperti Bank Indonesia, BPR, serta program perguruan tinggi. Aldo menjelaskan bahwa Bank Indonesia pernah memberikan bantuan signifikan berupa saprodi lengkap dan bahkan kendaraan pickup untuk program pangan, meskipun dukungan khusus untuk pekarangan belum tersedia pada tahun berjalan (Aldo, wawancara pribadi, 2025). Implikasi kebijakannya adalah perlunya pemerintah kota membangun mekanisme koordinasi lintas lembaga agar informasi program dapat sampai ke Poktan secara cepat dan merata. Koordinasi ini akan memperkuat kolaborasi multipihak sebagaimana direkomendasikan oleh Akbar et al. (2025), yang menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan merupakan faktor kunci ketahanan pangan.

Wawancara juga menunjukkan bahwa kelompok pemula perlu diberikan "starter" berupa pelatihan teknis sebelum bantuan fisik. Aldo menyatakan bahwa bantuan fisik sangat bergantung pada anggaran tahunan, sedangkan pelatihan dapat dilakukan lebih fleksibel dan realistis sebagai modal awal Poktan (Aldo, wawancara pribadi, 2025). Implikasi kebijakannya adalah pemerintah perlu menyediakan kurikulum pelatihan *urban farming* yang terstandar, termasuk materi budidaya pekarangan, manajemen kelembagaan, serta pengembangan usaha tani. Pendekatan ini selaras dengan Sumaryanto & Rustandi (2017) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan fondasi bagi keberlanjutan Poktan.

Dari sisi internal, penyuluh pertanian menghadapi kendala struktural akibat peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Aldo menyampaikan bahwa penyuluh saat ini berada dalam fase menunggu instruksi dan pola kerja baru, sehingga ada ketidakpastian apakah program *urban farming* dan pekarangan tetap menjadi fokus atau dialihkan ke prioritas lain seperti tanaman pangan (Aldo, wawancara pribadi, 2025). Kondisi ini berpotensi melemahkan intensitas pendampingan Poktan pada periode transisi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya kejelasan SOP pendampingan selama masa peralihan, termasuk jaminan keberlanjutan program penyuluhan untuk *urban farming* agar tidak terjadi stagnasi di tingkat kelompok masyarakat.

Selain itu, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar program yang dijalankan Poktan dan kelurahan di Pontianak masih kurang terdokumentasi secara sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan Campbell et al. (2025) bahwa kurangnya data sosial-ekologis menghambat evaluasi keberlanjutan *urban farming*. Implikasi kebijakannya adalah pemerintah kota perlu mengembangkan sistem pendataan terintegrasi berupa dashboard ketahanan pangan yang memuat data Poktan, jenis bantuan, lokasi intervensi, serta capaian produksi *urban farming*. Sistem ini akan memperkuat evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy) dan mempermudah koordinasi antarinstansi.

Secara keseluruhan, wawancara lapangan memperkuat hasil kajian pustaka bahwa keberhasilan *urban farming* tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis masyarakat, tetapi juga oleh tata kelola program, akses dukungan lintas lembaga, serta kejelasan struktur pendampingan penyuluh. Kebijakan yang terkoordinasi, pendampingan berbasis data, dan kolaborasi multipihak menjadi prasyarat utama bagi efektivitas *urban farming* sebagai strategi ketahanan pangan Kota Pontianak.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Pontianak menghadapi tekanan serius akibat semakin meluasnya konversi lahan produktif menjadi permukiman dan kawasan komersial (Fatahillah, 2022). Dalam kondisi tersebut, *urban farming* menjadi solusi strategis yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan, memperkuat kemandirian rumah tangga, serta menciptakan manfaat lingkungan dan ekonomi (Gunapala et al., 2025; Croce & Vettorato, 2021). Praktik seperti hidroponik, akuaponik, kandang ayam petelur skala rumahan, hingga model terpadu seperti PAKAR TUE MARIANA terbukti mudah diadopsi dan relevan dengan karakteristik lahan perkotaan.

Pembentukan dan penguatan Poktan berperan penting untuk menjadikan *urban farming* lebih terorganisir. Sesuai Permentan No. 67/2016, Poktan menjadi wadah pembinaan, adopsi teknologi, dan akses bantuan. Namun, tantangan tetap ada: keterbatasan lahan, permodalan, kapasitas manajerial, dokumentasi yang belum sistematis, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Wawancara penyuluh juga menegaskan perlunya kejelasan pendampingan di tengah perubahan kelembagaan penyuluh menuju 2026.

Secara keseluruhan, *urban farming* yang didukung Poktan yang kuat dan kebijakan pemerintah yang terkoordinasi memiliki potensi besar memperkuat ketahanan pangan Kota

Pontianak. Penguatan kapasitas, kolaborasi lintas lembaga, serta pendataan yang lebih baik menjadi kunci keberlanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penyuluh pertanian Kota Pontianak dan pihak Kelurahan Mariana yang telah memberikan wawancara dan informasi lapangan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh narasumber, dosen pembimbing, serta pihak-pihak yang telah membantu memberikan data dan referensi yang relevan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Darma, R., Irawan, A., Fudjaja, L., Amandaria, R., & Akzar, R. (2025). An institutional framework for enhanced food security amidst the COVID-19 pandemic: Strategic implementation and outcomes. *Journal of Agriculture and Food Research*, 13, 101833. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.101833>
- Aldo, A. (2025). Transkrip wawancara penyuluh pertanian Kota Pontianak. Dokumen tidak diterbitkan.
- Campbell, C. G., DeLong, A., & Campbell, D. N. (2025). Who are urban farmers? A typology of goals, motivations, and reasons for urban farming. *Urban Forestry & Urban Greening*, 89, 129012. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.129012>
- Croce, S., & Vettorato, D. (2021). Urban surface uses for climate-resilient and sustainable cities: A catalogue of solutions. *Sustainable Cities and Society*, 75, 103313. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103313>
- Fatahillah, A. (2022). Analisis perubahan tutupan lahan di Kota Pontianak: Kajian tutupan sawah dan lahan terbuka. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 10(2), 184–193. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmtluntan/article/view/56311>
- Gosestjahjanti, F. S., Winanti, W., Basuki, S., Himmy'azz, I. K., Supriyanto, M. P., Yusuf, M., & Jubaedah, I. (2024). Sosialisasi pelaksanaan program ketahanan pangan melalui budidaya ayam petelur berbasis ekonomi kreatif untuk UMKM di Pasar Kecapi Jatimurni Kota Bekasi. *Bangun Rekaprima: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(1), 44–52. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/bangun_rekaprima/article/view/4419/108547
- Gunapala, R., Gangahagedara, R., Wanasinghe, W. C. S., Samaraweera, A. U., Gamage, A., Rathnayaka, C., Hameed, Z., Abdel Baki, Z., Madhujith, T., & Merah, O. (2025). Urban agriculture: A strategic pathway to building resilience and ensuring sustainable food security in cities. *Food and Agricultural Systems*, 100150. <https://doi.org/10.1016/j.farsys.2025.100150>
- marianaptk.kota [@marianaptk.kota]. (2025, October 16). PAKAR TUE MARIANA Ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan merupakan isu penting ... [Reel]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DP2d0JVEveR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFlZA==
- Mulya, S. P., Hudalah, D., & Prilandita, N. (2024). Developing a new methodology for determining typologies of peri-urban agriculture: A case study of the Jakarta–Bandung Mega Urban Region, Indonesia. *Land Use Policy*, 137, 107310. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107310>
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016. (2016). *Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Raja, S., Campbell, M. C., Judelsohn, A., Born, B., & Morales, A. (2024). *Planning for equitable urban agriculture in the United States: Future directions for a new ethic in city*

- building*. Springer. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-32076-7.pdf>
- Rozaki, Z. (2021). Food security challenges and opportunities in Indonesia post COVID-19. In *Advances in Food Security and Sustainability* (Vol. 6, pp. 125–142). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.002>
- Steviano, O., & Kustanti, E. (2021). *Urban farming: Solusi bertani di perkotaan*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/13873>
- Sumaryanto, & Rustandi, Y. (2017). *Buku ajar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani*. Pusat Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/14170>